

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagian besar jumlah penduduk Indonesia adalah perempuan. Posisi keterwakilan politik perempuan di Indonesia baru 17,8 persen, dalam konteks global jauh di bawah negara-negara lain di berbagai penjuru dan belahan dunia. Sepuluh Negara terbesar tingkat keterwakilan politik perempuan antara lain Rwanda (56,3 persen), Andorra (50persen), Kuba (45,2 persen), Swedia (44,7 persen), Republik Seychelles (43,8 persen), Finlandia (42,5 persen), Afrika Selatan (42,3 persen), Belanda (40,7 persen), Nikaragua (40,2 persen) dan Islandia (39,7 persen). Amerika Serikat negeri yang dianggap demokratis hanya menempati urutan ke-78, dengan tingkat legislator perempuan di parlemen hanya 16,8 persen di Lower Chamber dan 17% di senat.¹

Perempuan yang biasanya terlihat tidak mempunyai kedudukan dan di nomer duakan dalam mengambil suara keputusan bersama harus segera berubah agar menjadi perempuan yang aktif dan tegas. Oleh karena itu perlu sekali diberi perhatian terhadap kepentingan politiknya. Perhatian terhadap kepentingan politik perempuan secara konkrit baru dimulai pada tahun 2003

¹ Andi Suwarko, Jurnal: EXECUTIVE SUMMARY, Judul Penelitian: Quota Keterwakilan Politik Perempuan (Telaah Rekrutmen Pengurus Dan Caleg Di DPW PAN Jawa Timur Pada Pemilu 2014),hal : 2

yang ditandai dengan masuknya pengaturan dalam UU. Pemilu mengenai 30 % keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Pada tahun 2008 Undang-undang Pemilu telah direvisi dan pengaturan mengenai keterwakilan perempuan ditetapkan dengan menggariskan bahwa Parpol peserta Pemilu harus mencalonkan 30% caleg perempuan dalam daftar calonnya. Ketentuan dalam UU/Pemilu ini diperkuat oleh pengaturan dalam UU. No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai politik harus menempatkan 30% perempuan dalam kepengurusan partai. Sekalipun telah ada pengaturan keterwakilan perempuan dalam parlemen melalui kedua undang-undang Pemilu di atas, tetapi ketentuan 30% keterwakilan perempuan di parlemen tidak tercapai. Hasil Pemilu 2004 anggota Parlemen perempuan hanya 12 % dan Pemilu 2009 18 %. Hal ini berarti bahwa perempuan baik dalam menentukan kebijakan politik (*political ideas*) dan kehadirannya dalam politik (*political presence*) belum terwakili secara signifikan.²

Pemerintah Indonesia, menjadikan demokrasi menjadi salah satu prioritas pembangunan bidang politik. Demi menunjukkan komitmen itu, Bappenas telah mengembangkan alat ukur untuk menilai kemajuan demokrasi yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI menjadi salah satu target sektoral dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Walaupun Indonesia masih harus membuktikan dirinya sebagai

² Sujito, "Perempuan dalam Pemilu 2009: Refleksi Kritis" dalam Jurnal Sosial Demokrasi, edisi 6, Tahun 2, Juni-Agustus 2009, hal: 57

negara demokratis karena capaian nilai IDI-nya masih rendah. Perlu diketahui, nilai IDI tahun 2010 adalah 63.17, turun dari capaian tahun 2009, yakni 67.3. Tiga aspek penting yang diukur dalam IDI adalah aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi. Untuk menuju negara yang demokratis, pembangunan yang dilaksanakan harus bersifat inklusif. Karena itu salah satu variabel yang dinilai dalam aspek kebebasan sipil adalah kebebasan dari diskriminasi gender. Begitu pula hak politik untuk memilih dan dipilih, variabelnya adalah prosentase perempuan yang dipilih menjadi anggota DPRD. Adapun penilaian lembaga demokrasi secara khusus menyorot persentase perempuan dalam kepengurusan parpol di provinsi. Di antara tiga aspek itu, hak-hak politik menyumbang nilai terendah (54.6 pada tahun 2009, turun menjadi 47.87 pada tahun 2010). Karena itu, dunia internasional butuh pembuktian dari Indonesia bahwa perempuan menjadi agen penting bagi upaya demokratisasi melalui peningkatan jumlah mereka di Parlemen.³

Tujuan peningkatan jumlah kuota perempuan adalah dalam rangka memastikan implementasi pelaksanaan UU yang pro perempuan. Kalangan gender berpendapat, masih tingginya kekerasan terhadap perempuan disebabkan implementasi UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) belum efektif. Selain itu, perempuan dianggap akan mempermudah proyek legislasi penyusunan peraturan

³ Ardian, <http://news.detik.com/read/2010/12/17/102310/1527041/723/kebijakan-peningkatan-keterwakilan-perempuan-pemilu-2004-dan-2009>.di akses pada tanggal:18/04/2015

responsif gender. DPR masih dianggap punya pekerjaan rumah untuk melakukan revisi peraturan yang dianggap bias jender seperti UU Perkawinan No.1 tahun 1974, revisi KUHAP, Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, serta meloloskan aturan pro jender seperti RUU Keadilan Gender dan Kesetaraan Gender. Padahal beberapa produk peraturan itu, selain ditargetkan untuk kepentingan ekonomi, justru diciptakan dengan tujuan mempersoalkan hukum-hukum Islam.

Selain itu tantangan pada tata nilai, lembaga dan tradisi serta kewajiban-kewajiban sepihak membuat gerak perempuan dalam politik menjadi terbatas. Tata nilai dalam keluarga dan masyarakat, tradisi dan lembaga yang menempatkan laki-laki sebagai aktor wilayah publik akan membuat perempuan tidak memperoleh dukungan simbolik dari perannya. Kewajiban-kewajiban *domestic* dan *cultural* yang memberatkan perempuan akan mengurangi kesempatan dan dukungan substansif bagi keterlibatan perempuan itu sendiri. Tantangan lain yang juga muncul adalah minimnya kesempatan untuk perempuan untuk menambah kapasitasnya dalam politik. Berbagai kapasitas tersebut meliputi kemampuan mengorganisasi massa, berkomunikasi, mengorganisir lembaga, merancang program, mengelola keuangan, merancang strategi kampanye, merancang kebijakan, merancang sistem evaluasi kebijakan dan lain-lain.

Maka dari itu, tidak mengherankan apabila pada pemilu 2014 jumlah anggota perempuan di parlemen hanya berjumlah 14%, mengalami penurunan 4% dari pemilu 2009 lalu yang mencapai presentase 18%. Kurangnya

keterwakilan politik perempuan di parlemen, rupanya tidak hanya terjadi di tingkat nasional, namun juga di tingkat lokal sebagaimana terilustrasi pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Jumlah Perempuan di DPRD Jawa Timur

Pemilu	Jumlah Anggota DPRD Jawa Timur	Jumlah Anggota DPRD Jawa Timur (Perempuan)	Presentase
1999	100	11	11%
2004	100	16	16%
2009	100	17	17%
2014	100	15	15%

Sumber: Sekretariat DPRD Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur.

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat jelas, bahwa tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Timur yang sempat mengalami kenaikan dalam dua kali pemilu, kini turut mengalami penurunan. Hal itu terlihat pada presentase keterwakilan politik perempuan dari 11% pada pemilu 1999, naik menjadi 16% pada pemilu 2004, naik kembali menjadi 17% pada pemilu 2009, dan lalu kini turun menjadi 15% pada pemilu 2014. Pemilu 2014 juga perlu usaha keras dan strategi yang tepat untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam Parlemen. Kelompok perempuan harus membangun kekuatan politik dengan menyusun strategi baik melalui pengaturan dalam undang-undang Pemilu maupun pendekatan kepada partai-partai politik sebagai peserta Pemilu dan juga kepada masyarakat umum.

Secara kuantitas, jumlah perempuan di parlemen pada masa reformasi dapat dikatakan lebih progres dari ada pemilu-pemilu sebelumnya di zaman Orde Baru. Hal ini dapat dibuktikan dengan data meningkatnya presentase sejumlah perempuan dari waktu ke waktu sesudah reformasi, yakni tahun 1999 yang hanya terdapt 9% representasi perempuan, tahun 2004 naik menjadi 11,3% dan terakhir tahun 2009 lalu yang besarnya 17,9% dari total keseluruhan kursi parlemen, khususnya DPR RI. peningkatan yang demikian, memang dikatakan sebagai suatu kabarbaik bagi perjuangan perempuan dalam mencapai kesetaraan, walau memang presentase jumlah yang ada masih jauh di bawah standar komposisi kuota yakni 30%. Namun ada juga pernyataan, masih kurangnya perwakilan perempuan dari standar komposisi tersebut juga dapat mengindikasikan lambannya kemajuan yang di perjuangkan oleh perempuan untuk di perjuangkan berperan secara seimbang dengan laki-laki.⁴ Memang pada dasarnya perhatian pada kouta perempuan dalam perlemen ini juga menjadi suatu kritik oleh beberapa pihak karena terlihat sederhana dan kurang signifikan dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan perempuan. Ide *The Politic of Presence* yang di cetuskan oleh Anne Philip yakni perlunya peningkatan jumlah perwakilan perempuan di parlemen untuk di perjuangkan hak-hak mereka, saat ini rasanya kuang tepat dan relevan.⁵

⁴ Wahidan Zein Siregar, "Representasi Perempuan di DPRD, PDP, MPR, dan DPRD 2009-2014: Komposisi, Peran dan Tantangan Perempuan Parlemen" Jurnal Perempuan vol.18 no.4 (2013):29

⁵ *Ibid*, hal: 31

Penelitian ini berfokus pada kabupaten Pemekasan, yakni sebuah kabupaten di pulau madura, propinsi jawa timur, indonesia. Ibukotanya adalah pemekasan. Kabupaten ini berbatasan di laut jawa utara selat madura di selatan, kabupaten sampang di barat, dan kabupaten sumeneb di timur, kabupaten pemekasan terdiri atas 13 kecamatan yang dibagi lagi atas 178 desa dan 11 kelurahan. Pusat pemerintahannya ada di kota pemekasan.

Madura sendiri merupakan salah satu daerah yang memiliki rata-rata sifat masyarakat yang keras. Contoh sifat keras disini di buktikan dengan tradisi carok yang tak pernah hilang sampai sekarang. Walaupun madura adalah salah satu kampung yang masyarakatnya sangat fanatik dengan agama namun tradisi carok tak dapat dilepaskan. Rasa kultural yang menimbulkan rasa malu dapat menimbulkan tindakan kekerasan atau carok di dalam pengalaman orang Madura berkaitan dengan kasus-kasus berikut ini:⁶

1. Gangguan atas istri. Orang Madura akan mudah terpancing dan melakukan pembelaan dalam bentuk carok kalau istrinya diganggu. Begitu juga dengan adanya sikap cemburu, kalau kemudian terjadi perselingkuhan sang istri dengan orang lain. Lelaki yang berselingkuh dengan istri orang itulah yang akan menjadi sasaran dari sang suami.
2. Balas dendam. Upaya melakukan pembalasan bila terdapat diantara salah satu anggota keluarga yang terbunuh.
3. Mempertahankan martabat

⁶<https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 18/01/2015

4. Mempertahankan harta warisan.

Dapat dilihat dalam rangkaian di atas bahwa motif peristiwa carok dan juga sasarannya sangat jelas, yakni individu yang sedang saling berselisih paham yang sulit didamaikan karena sudah menyangkut harga diri yang terluka. Banyak kasus yang tersorot di dalam masyarakat, yakni seseorang yang sebelumnya dipandang bukan sebagai golongan *blater*, disebut sebagai *blater* oleh warga lainnya karena berani melakukan carok. Jadi penyebutan masyarakat atas sosok *blater* dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan keberanian melakukan carok dalam menghadapi konflik dan permasalahan di dalam lingkungan masyarakat. Di sini carok dijadikan sebagai arena legitimasi untuk mengukuhkan status sosial seseorang sebagai seorang *blater*. Jadi ciri khas pada seorang blater adalah sifat pemberani, angkuh dan punya nyali menempuh jalur kekerasan dalam penyelesaian konflik harga diri. Meskipun carok bukanlah satu-satunya arena untuk melegitimasi status seseorang menjadi *Blater*. Masih banyak arena sosial lainnya yang membentuk dan memproses seseorang menjadi blater. Misalnya, kedekatan seseorang dengan tradisi kerapan sapi, sabung ayam, jaringan kriminalitas dan *remoh blater*. Begitulah antara lain reproduksi kultural blater di masa kini. Dari berbagai macam peristiwa yang telah terjadi karena blater tersebut menciptakan kultur dan komunitas tersendiri di dalam masyarakat Madura. Tak heran bila seseorang sudah memiliki identitas dan status sosial sebagai seorang blater eksistensinya memiliki posisi sosial tertentu di dalam masyarakat Madura. Sosok blater selalu disegani dan dihormati secara sosial.

Sangat jarang sekali ditemukan seseorang yang sudah dikategorikan sebagai *blater* dipandang rendah secara sosial.⁷

Dinamika politik di tingkat desa juga ditingkat kabupaten, sesungguhnya berada ditangan dua komunis, yakni *blater* dan kiai. Kalupun kedua komunis ini memiliki pengaruh terhadap perbaikan kualitas layanan publik masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan lainnya dalam tata kuasa pemerintahan maka pelaksanaan otonomi dan desentralisasi politik di Madura akan mendulang masa depan yang mengembirakan. Namun, bila kedua komunitas ini tidak memiliki fungsi atas perubahan dan perbaikan maka masyarakat Madura akan menghadapi masa-masa suram, justru di tengah era desentralisasi yang menjadi dambaan banyak pihak yang begitu lelah dengan sentralisasi di era Orde Baru. Memang ada komunitas lain di luar kedua *maisntreams* itu, yakni kalangan akademisi. Namun perannya masih belum signifikan dalam mempengaruhi politik kuasa di Madura.

Peran perempuan di Madura pun lebih besar dari pada laki-laki. Dalam sehari perempuan menghabiskan waktu dalam sekitar 12,42 jam (51,75%) sedangkan laki-laki hanya 8,73 jam/hari (36,39%). Perbedaan waktu 3,69 jam/hari antara peran laki-laki dan peran perempuan menunjukkan beban yang lebih diterima perempuan. Hal ini di sebabkan perempuan terlibat aktif dalam kegiatan produktif (bekerja). Kondisi ini di sebabkan karena perekonomian keluarga yang belum bisa membawa keluarga pada taraf kesejahteraan.

⁷ *Ibid*,

Keterpaksaan perempuan memilih beban ganda karena dalam usaha mencari tambahan penghasilan untuk membantu memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup keluarga.⁸

Perempuan di Madura di bebaskan dengan beban pekerjaan yang lebih banyak dari laki-laki. Dilain pihak perempuan juga aktif dalam usaha membantu menambah kebutuhan ekonomi keluarga dengan jalan menjadi pedagang ikan hasil tangkapan suaminya serta menambah nilai jual hasil tangkapan dengan melakukan pengolahan ikan jika tidak laku terjual. Selain itu juga ada perempuan memilih profesi sebagai buruh perikanan. Pembagian peran berdasarkan jenis kelamin di anggap sebagai hal yang wajar bagi para masyarakat madura. Seluruh perempuan merasa pekerjaan rumah tangga yang di identikan dengan jenis kelamin mereka adalah hal yang wajar tidak merasa terbebani, apalagi tertindas dengan kewajibannya. Walaupun mereka merasa kelelahan dengan pekerjaan rumah. Perempuan sangat menghargai jika para suami ikut membantu pekerjaan rumah tangga, apalagi bagi perempuan yang memiliki peran ganda.⁹

Bupati Pamekasan Achmad Syafi'i mengharapkan agar perempuan tidak lagi berpangku tangan diranah domestik, melainkan juga bisa berkiprah di ranah publik dengan mobilisasi organisasi bupati pamekasan mengharapkan agar organisasi-organisasi yang berbau politik menggajak mengontrol politik

⁸ Ahmad Subyani, "Kesetaraan Gender Pada Masyarakat Pesisir", <http://www.scribd.com/doc/24366449/Kesetaraan-Gender-Pada-Masyarakat-Pesisir#scribd>, diakses pada tanggal 15/04/2015

⁹ *Ibid*,

dan bermitra dengan pemerintah. Dengan bentuk mitra berkaitan pembangunan dan pencerdasan bangsa. Bahkan PC PMII Pamekasan mengadakan seminar yang bertema “Politik dan Perempuan” dalam rangka menyiapkan calon pemimpin perempuan handal di masa depan, baik ditingkat lokal, regional, maupun Nasional. Hal ini dilakukan karena peran perempuan khususnya di ranah politik masih sangat rendah dan kurang di apresiasi oleh kebanyakan orang. Padahal, eksistensi perempuan dalam bidang politik sejatinya merupakan bagian penting dari tegaknya demokrasi di negara ini.¹⁰

Tidak hanya dalam bidang pekerjaan domestik saja, dalam pekerjaan publik Pamekasan-Madura adalah salah satu contoh daerah yang peran dan keterwakilan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan publik selama ini masih dirasa kurang. Untuk itu dilakukan berbagai upaya untuk mendorong peran dan keterwakilan perempuan melalui penerapan kuota minimal 30% bagi perempuan di parlemen. Dari berita yang didapat melalui media online bahwa partai politik di Kabupaten Pamekasan, Madura, mengaku kesulitan merekrut calon legislatif (caleg) perempuan untuk Pemilu Legislatif 2014. Partai Amanat Nasional pasca pemilu 2014 juga mengalami kekurangan calon legislatif perempuan dan masih kurang satu dapil yang kosong untuk mencakupi kuota 30% perempuan. Ketentuan 30 persen keterwakilan kaum perempuan sebagai bakal calon legislatif pada Pemilu 2014 kali ini merupakan keharusan dan apabila tidak, maka akan ditolak oleh KPU. Maka

¹⁰ Abdul Hady, *Menunggu Kiprah Perempuan di Ranah Publik*, <http://m.santrinews.com/akbar/Daerah/363/menunggu-kiprah-perempuan-di-ranah-publik/2013/06/14//>(Senin, 8 Juni 2015)

dari itu perekrutan keterwakilan kaum perempuan harus diusahakan semaksimal mungkin untuk mencukupi kuota yang tersisa.¹¹ Partai PPP Pamekasan juga mengalami kesulitan dalam pemilihan calon legislatif perempuan yang justru sangat sedikit peminatnya. PPP terus mengajak kepada aktivis perempuan di Pamekasan untuk ikut berkiprah di dunia politik, termasuk kalangan muslimat.

Di Kabupaten Pamekasan partai politik yang memiliki keterwakilan perempuan di DPRD berdasarkan hasil Pemilu Legislatif periode 2009 lalu hanya dua partai yaitu dua orang perempuan dari 41 anggota legislatif yang lolos, yakni Partai Golkar yang di wakili oleh Hj. Soetrisni dan Partai Demokrat yang di wakili oleh Nur Fatilah. Sedangkan partai-partai lain, seperti PPP, PAN, PBB, PKNU, serta Partai Gerindra, termasuk PKS tidak ada anggota legislatif dari unsur perempuan yang terpilih di DPRD Pamekasan.

Menyadari keterwakilan perempuan dalam parlemen masih rendah, maka perempuan harus meningkatkan usaha dan melakukan gerakan untuk memajukan perempuan dalam politik. Untuk hal ini perlu dukungan dari seluruh perempuan di Indonesia, Para perempuan baik yang berada di pemerintahan, di legislative, yang bekerja sebagai karyawan swasta, buruh pabrik, ataupun profesional harus turut serta mendukung usaha meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Bila keterwakilan

¹¹ Ratna Putri, "Parpol Di Pamekasan Kekurangan Caleg", <http://www.lensaIndonesia.com/2013/03/05/parpol-di-pamekasan-kekurangan-caleg-perempuan.html>. diakses pada tanggal: rabu, 18/04/2015

perempuan dalam parlemen cukup signifikan maka perempuan dalam parlemen akan dapat mendorong berbagai kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan meningkatkan pengawasan terhadap program dan anggaran, baik pada level perencanaan maupun pencapaian pembangunan.

Dalam penetapan pemilihan dan jumlah anggota DPRD Kabupaten Pamekasan dalam pemilihan umum periode 2014 mendapatkan 45 jumlah kursi dari 731.072 penduduk dan keterwakilan perempuan dalam 45 kursi tersebut masih sangat kurang, dalam artian perempuan di DPRD kabupaten Pamekasan tidak sampai 30% yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Perempuan yang menempati posisi tersebut hanya kurang lebih 4% dari 45 kursi yang ada. Saat ini nama-nama ke-45 calon legislatif terpilih dan sudah dilantik pada 21 Agustus 2014 adalah¹² :

Tabel 1.2
Daftar Nama Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan

Dapil 1 : Kota dan Tlanakan		
Nama	Partai	Suara
Ismail	Demokrat	6.360
Taufiqurrahman	Gerindra	5.041
Abdul Haq	PAN	3.288
Haeri	PDIP	3.627
Wardatus Sarifah	Nasdem	2.837
Suryono	PKS	3.316
Sri Rahayu Ningsih	PBB	2.776
Maskur Rasyid	PPP	2.759

¹² Samsul Arifin,
http://www.m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/215699/inilah_45_anggota_dprd_pamekasan_periode_2014-2019.html, Diakses pada tanggal 22 agustus 2014

Dapil 2 : Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan		
Nama	Partai	Suara
Muhammad Sahur	PPP	13.140
Anwar Syamsidi	PPP	8.184
Fathorrahman	PPP	5.211
Imam Hosairi	PKB	4.564
Ach. Tatang	Golkar	6.469
Bahrullah	PBB	5.039
Apik	Nasdem	4.998
Muhammad Rusi	PAN	4.755
Nur Fatilah	Demokrat	2.808

Dapil 3 : Kecamatan Waru, Pasean, dan Kecamatan Batumarmar		
Nama	Partai	Suara
Andi Suprto	PPP	8.373
Muksin	PPP	5.655
Munaji	PKB	5.671
Faruk ali	PKB	5.013
Suli Faris	PBB	5.735
Iskandar Zulkarnain	PBB	5.227
Moh. Tharmom	PAN	6.191
Moh. Ali	Demokrat	3.150
Al Anwari	PKS	4.273
Hasyim	Nasdem	4.581
Fadli	Golkar	3.720

Dapil 4 : Kecamatan Kadur, Pakong, dan Kecamatan Pangetanan		
Nama	Partai	Suara
Halili	PPP	9.004
Ahmadi	PPP	4.568
Moh. Zaiful	PKB	6.563
Rida'i	Gerindra	6.498
Zainal Abidin	PAN	3.313
Robbi Fernandi	Demokrat	4.702
Imam Syafi'i Yahya	Golkar	4.516
Sulhan	PBB	4.338

Dapil 5 : kecamatan Pademawu, Galis, dan Kecamatan Larangan		
Nama	Partai	Suara
Muhammad Karimulla	Gerindra	6.149
Iskandar	PPP	6.264
Hermanto	Demokrat	5.360
Rize Ikhwan muttaqin	Golkar	4.848
Samsuri	PKB	5.111
Muhammad Hadari	Nasdem	2.775
Agus Sukarmadi	PDIP	4.850
Moh. Hosnan	PAN	5.481
Harun Suyitno	PKS	2.268

Dari data yang di atas hanya tiga orang perempuan yang dapat mewakili partainya untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif kabupaten Pamekasan 2014 yakni Sri Wahyu Ningsih (PBB) dan Wardatus Safira (Nasdem) yang ditempatkan di Kecamatan Tlanakan, dan Nur Fatilah (Demokrat) yang di tempatkan di kecamatan Proppo dan Palengaan. Namun jika dilihat dari hasil suara yang tertera di atas kuantitas perempuan masih sangat kecil. Dilihat dari banyaknya suara yang di dapat oleh caleg laki-laki. Jika di jumlah dengan keseluruhan suara yakni 229.369. Dari caleg perempuan untuk keseluruhannya ada 8.421 suara dan 220.948 suara untuk keseluruhan caleg laki-laki. Alokasi jumlah kursi DPRD Pamkasan 45 kursi yang di perebutkan caleg sebanyak 663 orang pemilu yang ada di wilayah tersebut.¹³ Dari 45 anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Periode 2009-2014, yang lolos kembali hanya 14 orang atau hanya 31 persen. Hal itu diketahui setelah rekap manual hasil pemilu 2014 selesai digelar oleh KPU Kabupaten Pamekasan.

Jika dilihat dari visi dan misi yang di lontarkan dari beberapa calon legislatif perempuan di Pamekasan, dapat dilihat bahwa banyak calon angkatan 2014 yang ingin merubah kehidupan masyarakat Madura Pamekasan menjadi lebih baik dan berpendidikan. Juga beberapa dari mereka yang mencalonkan legislatif bertujuan untuk memperbaiki dan

¹³ Anggota Dewan PKS Se Jawa Timur 2009, Hasil Pemilu 2009, PKS Kab Pamekasan, Diposkan oleh penggerak.bangsa di 07.28, di akses pada tanggal 13/04/2014

mensejahterakan perempuan Madura Pamekasan menjadi lebih baik dalam sosial dan pekerjaan untuk menjadi perempuan yang lebih aktif dan kreatif.

Partai-partai politik memainkan peran penting dalam mempengaruhi jumlah perempuan yang terpilih masuk ke parlemen. Bahkan saat ini, partai-partai politik belum menunjukkan komitmen yang kuat dan rumusan-rumusan kebijakan mengenai kesempatan yang setara bagi anggota perempuan agar terpilih sebagai fungsionaris partai dan anggota parlemen. Cara partai-partai politik menyusun daftar calon mereka untuk jabatan pilihan, berapa banyak perempuan dimasukkan dalam datar-daftar itu, dan apakah perempuan ditempatkan pada posisi-posisi yang dapat dipilih sejauh ini mengindikasikan kurangnya perhatian dan komitmen bagi representasi perempuan. Dalam beberapa hal, tindakan-tindakan diskriminatif dilakukan oleh fungsionaris partai politik terhadap anggota perempuan mereka sendiri dalam menyeleksi para calon mereka untuk parlemen daerah dan nasional.¹⁴

Tidak ada strategi terpadu untuk menarik lebih banyak perempuan ke dalam partai politik. Perempuan tidak terdorong dan ada kekosongan program untuk mensosialisasikan dan melatih anggota partai wanita untuk menjadi kader partai yang memenuhi syarat dan berkemampuan tinggi. Pengaturan kegiatan organisasi oleh partai-partai politik menunjukkan tiadanya usaha mempelajari kebutuhan dan kepentingan perempuan. Sering

¹⁴ Ana Fitriana, Jurnal: *Strategi Kampanye Calon Legislatif Pemilu DPR RI Dari Partai Persatuan Pembangunan (studi kasus: Strategi Kampanye Caleg Perempuan DPR RI dari Partai PPP Dapil JABAR dalam Memenangkan Pemilu 2014)* hal:4

ditemukan adanya pertentangan jadwal antara event-event dan rapat-rapat partai politik dengan para anggota perempuan mereka sendiri yang harus bertanggung jawab untuk urusan rumah tangga mereka sendiri. Ada kekurangan dari rumusan kebijakan dan program-program resmi oleh partai-partai politik yang menyoroiti dan menekankan pentingnya kebutuhan, kepentingan dan isu-isu perempuan dalam partai-partai itu sendiri, di parlemen dan dalam kehidupan publik.

Selain itu juga perbedaan dari pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik dapat juga dilihat dari metode rekrutmen politik yang dilakukan, baik menggunakan metode ilmiah ataupun dengan menggunakan metode non ilmiah. Dalam proses tersebut, metode rekrutmen politik tersebut bersangkutan dengan ada tidaknya pedoman yang dijadikan acuan serta digunakan dalam menentukan calon legislatif yang usung. Berkaitan dengan mekanisme sistem pemilu yang menentukan pada sistem proposional terbuka seidaknya juga mengharuskan partai politik yang lebih selektif dalam melakukan kecenderungan untuk melakukan rekrutmen politik. Tujuannya agar kualitas serta integritas calon legislatif sesuai dengan yang dicita-citakan oleh masyarakat serta agar masyarakat tidak salah pilih nantinya.

Dari latar belakang yang telah terurai, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai fenomena keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pamekasan. Dengan melihat uraian yang telah di dapat sebelumnya, peneliti ingin lebih menganalisa keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pamekasan dengan meneliti langsung ke kantor DPRD Pamekasan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana rekrutmen DPRD perempuan saat memasuki partai hingga menjadi calon legislatif?
2. Motif apa yang melatarbelakangi perempuan untuk menjadi anggota Legislatif Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan

Melihat dari latar belakang dan rumusan masalah dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan perekrutan DPRD perempuan di Pamekasan mulai perekrutan menjadi kader partai hingga calon legislatif
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan seperti apa motif yang melatarbelakangi perempuan untuk menjadi anggota legislatif.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terutama:

1. Secara teoritis:

Penelitian ini akan menambah khazanah dalam disiplin ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu politik. Di sisi lain, bermanfaat untuk mengetahui dan memahami teori, konsep, maupun isu yang sedang berkembang. Serta dapat menjadi bahan kajian awal yang dapat ditindak lanjuti dengan penelitian lebih luas dan mendalam tentang fenomena keterwakila perempuan di DPRD Pamekasan-Madura pada periode 2014

2. Secara praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan secara realitas seperti apa Fenomena keterwakilan perempuan pada periode 2014 di Kabupaten Pamekasan. Di sisi lain, bisa menjadi referensi bagi masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik. Serta penelitian ini diharapkan akan menjadi pemicu bagi perempuan dalam berpartisipasi di partai politik dan Legislatif.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian dan pembahasannya, diperlukan adanya sistematika pembahasan. Berikut peneliti akan menjelaskan sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini mengawali seluruh rangkaian pembahasan penelitian. Dalam bab pendahuluan ini telah terangkum konteks penelitian atau latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan judul dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kerangka Konseptual dan Teori

Bab ini akan menjelaskan mengenai kajian pustaka yang berkenaan dengan isi penelitian. Dalam hal ini perspektif teoritis tentang Fenomenologi untuk memperkuat pembahasan judul terkait fenomena keterwakilan perempuan di kabupaten Pamekasan. Di perkuat dengan kajian teoritis tentang Undang-undang kebijakan 30% keterwakilan perempuan di ranah publik.

Bab III : Metode Penelitian

Bab metode penelitian ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan. Selain itu dipaparkan pula lokasi penelitian, subyek penelitian, jenis dan sumber data, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik validasi data dan yang terakhir adalah tentang analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini disajikan data-data temuan dilapangan yang sesuai dengan fokus penelitian. Data temuan tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori yang telah di paparkan dalam bab II. Data tersebut meliputi Fenomena Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Pamekasan-Madura.

Bab V : Penutup

Bab penutup ini mengakhiri dari pembahasan penelitian. Pada bab ini disajikan dalam dua bentuk yaitu kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran atau rekomendasi dari peneliti.